



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Peneliti akan menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian dalam bab ini. Teori agensi, teori legitimasi, dan teori pemangku kepentingan membentuk kerangka teori. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang terkait dengan temuan penelitian yang dapat menjadi panduan dan membantu pengembangan penelitian penulis.

Untuk memudahkan pembaca, kerangka pemikiran ini menjelaskan perkembangan logis dari hubungan antara setiap variabel penelitian. Kerangka pemikiran juga akan menjelaskan bagaimana setiap variabel berhubungan dengan variabel lainnya. Peneliti dapat merumuskan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara berdasarkan teori dari topik yang akan diteliti, dari penjelasan teori yang telah dibahas sebelumnya dan pada akhir bab ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) didefinisikan sebagai hubungan kontrak antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen). Dalam hubungan kontrak tersebut, prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama mereka, yang mencakup transfer wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Sedangkan menurut Scott (2015), hubungan keagenan timbul karena pemilik bisnis tidak secara langsung dapat menjalankan bisnis mereka sendiri karena menjalankan sebuah organisasi adalah tugas yang kompleks dan terspesialisasi di mana pemiliknya mungkin tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan. Oleh karena itu, para pemilik modal mendelegasikan tugas-tugas kepada manajer agar perusahaan



dapat berfungsi optimal. Menurut pandangan Scott, prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terdapat konflik kepentingan. Agen mungkin berusaha untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, seperti memperoleh insentif atau komisi, yang dapat bertolak-belakang dengan kepentingan prinsipal yaitu meminimalkan biaya dan memaksimalkan laba.

Sementara menurut Eisenhardt (1989), konflik kepentingan antara prinsipal dan agen muncul akibat perbedaan tujuan dan motivasi masing-masing pihak, yang dapat menyebabkan biaya agensi. Prinsipal akan merasa kesulitan untuk memastikan tindakan agen dalam hal pemantauan biaya karena beragamnya tujuan dan keinginan yang ada di antara prinsipal dan agen, sehingga timbullah biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini mencakup pengeluaran untuk pengawasan dan mekanisme kontrol yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara kedua pihak. Selain itu, masalah akan muncul ketika prinsipal dan agen melakukan pendekatan untuk mengatasi potensi bahaya dari sudut pandang yang berbeda dan mengambil tindakan yang berbeda pula.

Hubungan antara teori keagenan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah dengan melakukan CSRD, perusahaan dapat mengurangi biaya agensi. Hal ini terjadi karena transparansi dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) memungkinkan pemegang saham untuk lebih memahami tindakan manajemen, sehingga mengurangi perilaku oportunistik dari manajer. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan biaya agensi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, CSRD yang baik dapat memperbaiki hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Hal ini penting karena keberlangsungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hidup perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari pemangku kepentingan.

- C** Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan reputasi positif di mata publik. CSRD juga dapat berfungsi sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik antara manajemen dan pemegang saham. Dengan adanya pengungkapan yang jelas mengenai kegiatan CSR, perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Menurut Freeman dan Mcvea (2001), individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberhasilan organisasi disebut sebagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak yang sangat penting dalam hal keberlangsungan sebuah organisasi, yang jika mereka tidak ada, maka operasi organisasi akan terhenti (Freeman dan David, 1983). Menurut teori pemangku kepentingan, organisasi harus memberi manfaat bagi para pemangku kepentingan dan juga kepentingan internalnya (Chariri, 2008). Organisasi yang unggul adalah organisasi yang selalu berusaha untuk memenuhi atau melampaui harapan pemangku kepentingan, tanpa mengorbankan kemampuan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya (Garvare dan Johansson, 2010).

Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola pemangku kepentingan ditentukan oleh strategi perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari dua jenis strategi, yaitu strategi aktif atau strategi pasif. Strategi aktif digunakan ketika perusahaan ingin mempengaruhi hubungan organisasinya dengan pemangku kepentingan yang dianggap berpengaruh atau signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan taktik pasif tidak secara teratur memantau tindakan para pemangku kepentingan dan tidak secara sengaja mencari teknik yang ideal untuk menarik perhatian para pemangku kepentingan. Tidak adanya pemantauan dan perhatian terhadap pemangku kepentingan mengakibatkan rendahnya pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan (Ullmann, 1985).

Hubungan antara teori pemangku kepentingan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* adalah teori pemangku kepentingan mendorong perusahaan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan. CSRD berfungsi sebagai alat untuk mencapai transparansi dengan menyediakan informasi yang relevan tentang dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan. Penerapan teori pemangku kepentingan dalam praktik CSR menunjukkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak dari aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSRD menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen tersebut kepada semua pihak terkait. Dengan mengungkapkan informasi CSR secara efektif, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan, yang dapat mendukung keberlanjutan bisnis. Dalam implementasi CSRD, perusahaan perlu melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Ini sejalan dengan prinsip teori pemangku kepentingan yang menekankan pentingnya memahami berbagai kepentingan yang ada. Teori pemangku kepentingan membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosialnya. CSRD memainkan peranan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penting dalam memastikan bahwa keputusan bisnis mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Teori Legitimasi

Legitimasi merupakan kondisi di mana terdapat keselarasan antara sistem nilai suatu entitas dengan sistem nilai yang berlaku dalam lingkungan sosial yang lebih besar di mana entitas tersebut berada. Ketika ada perbedaan, baik secara aktual maupun potensial, antara kedua sistem nilai tersebut, maka ada ancaman terhadap legitimasi entitas (Gray et al., 1995). Teori legitimasi berpendapat bahwa pertumbuhan kesadaran dan kepedulian masyarakat mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah strategis agar kegiatan dan kinerja mereka dianggap sah dan diterima oleh masyarakat (Wilmshurst dan Frost, 2000). Perusahaan mencari legitimasi dan menjaga hubungan dengan lingkungan sosial dan politik yang lebih luas di mana mereka beroperasi, dan perusahaan tidak dapat berkembang tanpa legitimasi. Legitimasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup suatu organisasi. Perusahaan yang tidak dianggap *legitimate* oleh masyarakat dapat menghadapi risiko penurunan dukungan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan keberlangsungan mereka. Organisasi harus responsif terhadap perubahan norma dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus mencerminkan perhatian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan untuk mempertahankan legitimasi mereka.

Dalam konteks CSR, perusahaan sering melakukan pengungkapan informasi terkait dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka. Pengungkapan ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan untuk memperoleh legitimasi dari pemangku kepentingan. *Corporate Social Responsibility Disclosure* dapat membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi kesenjangan legitimasi yang muncul ketika terdapat perbedaan antara harapan masyarakat dan perilaku perusahaan. Dengan melakukan pengungkapan yang transparan, perusahaan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan memenuhi harapan publik.

4 Laporan Tahunan (*Annual Report*)

a. Definisi Laporan Tahunan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik BAB I Pasal 1, laporan tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas pengelolaan dan pengawasan emiten atau perusahaan publik selama satu tahun buku, yang disusun sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Laporan tahunan dianggap informatif jika menyajikan informasi yang relevan dan penting bagi para penggunanya. Namun, tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam laporan tahunan bervariasi antar perusahaan, yang dipengaruhi oleh karakteristik dan filosofi manajemen masing-masing.

b. Komponen Laporan Tahunan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik BAB II Pasal 4, laporan tahunan wajib paling sedikit memuat:

1) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Untuk memberikan gambaran umum kinerja keuangan perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 2) Informasi Saham (jika ada)
Memberikan informasi terkait kepemilikan dan kinerja saham perusahaan.
- 3) Laporan Direksi
Menyajikan pertanggungjawaban direksi atas pengelolaan perusahaan.
- 4) Laporan Dewan Komisaris
Menyajikan pertanggungjawaban dewan komisaris atas pengawasan perusahaan.
- 5) Profil Emiten atau Perusahaan Publik
Memberikan informasi dasar tentang perusahaan.
- 6) Analisis dan Pembahasan Manajemen
Menjelaskan kinerja perusahaan dan prospek ke depan.
- 7) Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik
Mengungkapkan praktik tata kelola perusahaan.
- 8) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik
Melaporkan kegiatan dan kinerja perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 9) Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit
Menyajikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen.
- 10) Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan
Menegaskan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris atas keakuratan dan kelengkapan laporan tahunan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Laporan Keuangan

C a. Definisi Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Suriyanti dan Hamzah (2023) adalah dokumen penting yang disusun secara berkala untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini sangat berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat diandalkan mengenai: a) sumber daya ekonomi dan kewajibannya; b) perubahan yang terjadi pada sumber daya; c) data yang berguna untuk memperkirakan pendapatan yang mungkin diperoleh; d) informasi lain yang relevan untuk memperluas pemahaman (Siswanto, 2021). Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan yang memungkinkan pengguna untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan serta kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Tujuan laporan keuangan tidak hanya untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, tetapi juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dan pencapaian tujuan bisnis. Laporan keuangan dapat dijadikan alat analisis yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kinerja keuangan, mengukur efisiensi operasional, dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan nilai perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Pengguna Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak, seperti yang tercantum dalam PSAK Tentang Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014, yaitu:

1) Investor

Menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi potensi investasi dan membuat keputusan pembelian, penjualan, atau mempertahankan investasi.

2) Karyawan

Memanfaatkan laporan keuangan untuk menilai stabilitas perusahaan dan prospek masa depan, termasuk peluang kenaikan gaji dan tunjangan serta kesempatan kerja.

3) Pemberi pinjaman

Memakai laporan keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya.

4) Pemasok dan kreditur

Menggunakan laporan keuangan untuk menilai risiko kredit dan memastikan pembayaran tepat waktu.

5) Pelanggan

Membaca laporan keuangan untuk memastikan kelangsungan bisnis perusahaan, terutama bagi pelanggan yang memiliki kontrak jangka panjang.

6) Pemerintah

Memanfaatkan laporan keuangan untuk merumuskan kebijakan ekonomi, perpajakan, dan mengatur aktivitas bisnis.

7) Masyarakat

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menggunakan laporan keuangan untuk memahami peran perusahaan dalam perekonomian dan dampaknya terhadap masyarakat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK 201 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 terdiri dari:

- 1) Neraca;
- 2) Laporan laba rugi komprehensif;
- 3) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- 4) Laporan arus kas;
- 5) Catatan atas laporan keuangan;
- 6) Informasi komparatif periode sebelumnya; dan
- 7) Neraca awal periode komparatif jika ada perubahan kebijakan akuntansi retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi.

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Laporan keberlanjutan adalah praktek pengproporsi, pengungkapan dan upaya pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal (Rosyati et al., 2023). Laporan keberlanjutan merupakan suatu bentuk pelaporan yang menyajikan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu organisasi. Sesuai dengan kerangka GRI, laporan keberlanjutan dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan tujuan keberlanjutan, mengukur kinerja, serta sebagai sarana komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan juga memungkinkan perbandingan kinerja antar periode dan evaluasi terhadap pencapaian target keberlanjutan yang telah ditetapkan.



Dienes et al. (2016) menyatakan bahwa teori legitimasi dan pemangku

kepentingan (*stakeholder*) menjadi dasar teoretis dalam praktik pelaporan keberlanjutan. Teori legitimasi berakar pada konsep bahwa perusahaan beroperasi dalam suatu lingkungan sosial yang menuntut adanya kontrak sosial. Kontrak sosial ini mewajibkan perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang secara sosial diterima guna mencapai tujuan dan kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan dapat dipahami sebagai respon perusahaan terhadap tuntutan lingkungan sosial, yang bertujuan untuk melegitimasi tindakan-tindakan korporat. Konsep *stakeholder* diintegrasikan ke dalam manajemen strategis dengan tujuan utama untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan ini, perusahaan berupaya menciptakan sinergi positif yang berdampak pada peningkatan keunggulan kompetitif.

Global Reporting Initiative (GRI)

a. Latar Belakang GRI

Global Reporting Initiative (GRI) adalah organisasi internasional independen yang membantu perusahaan dan organisasi lain untuk menjadi transparan dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya sehingga dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan, dengan menyediakan bahasa global yang sama untuk mengkomunikasikan dampak tersebut yang memungkinkan dialog dan pengambilan keputusan yang tepat mengenai dampak-dampak yang ada. Sekretariat GRI berkantor pusat di Amsterdam, Belanda, dan memiliki lima jaringan regional untuk memastikan bahwa GRI mendukung organisasi dan pemangku kepentingan di seluruh dunia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Global Reporting Initiative (GRI) berdiri di Boston pada tahun 1997, delapan tahun setelah tumpahan minyak Exxon Valdez memicu protes publik. Berawal dari inisiatif CERES dan Tellus Institute, dengan dukungan Program Lingkungan PBB, GRI didirikan untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan mereka. Tujuan ini kemudian berkembang, menjadikan GRI sebagai standar global untuk pelaporan keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola

Global Reporting Initiative (GRI) pertama kali memperkenalkan kerangka kerja pelaporan keberlanjutan global pada tahun 2000 dengan publikasi G1. Setelah menjadi organisasi nirlaba independen pada tahun berikutnya dan memindahkan sekretariatnya ke Amsterdam pada tahun 2002, GRI memperbarui pedomannya menjadi G2. Karena meningkatnya permintaan dan penerimaan, panduan ini terus dikembangkan menjadi G3 pada 2006 dan G4 pada 2013.

b. Definisi Standar GRI

Standar GRI adalah praktik terbaik global untuk pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar ini bersifat modular, terdiri dari Standar Universal GRI, yang berlaku untuk semua organisasi; Standar Sektor GRI, berlaku untuk sektor tertentu; dan Standar Topik GRI, masing-masing memberikan pengungkapan yang relevan terkait dengan topik tertentu. Penggunaan Standar GRI membantu organisasi mengidentifikasi topik material yang relevan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Tujuan Standar GRI

Tujuan pelaporan keberlanjutan menggunakan Standar GRI adalah untuk memastikan transparansi tentang kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar ini memungkinkan pengungkapan publik mengenai dampak signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk hak asasi manusia, serta pengelolaan dampak tersebut, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Standar ini memuat panduan pengungkapan yang memungkinkan organisasi melaporkan informasi dampak secara konsisten dan kredibel, meningkatkan komparabilitas global dan kualitas informasi. Hal ini mendukung pengguna informasi dalam membuat penilaian dan keputusan terkait dampak dan kontribusi organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar GRI didasarkan pada tata cara bisnis bertanggung jawab sesuai instrumen organisasi antarpemerintah internasional seperti OECD dan PBB. Informasi yang dilaporkan dengan standar ini membantu pengguna menilai apakah organisasi memenuhi ekspektasi dalam instrumen tersebut.

d. Pengguna Standar GRI

Standar GRI dapat digunakan oleh semua organisasi, tanpa memandang ukuran, jenis, lokasi, atau pengalaman pelaporan sebelumnya, untuk melaporkan dampak mereka terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, termasuk hak asasi manusia. Informasi yang dilaporkan ini dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan internal, seperti menetapkan tujuan dan sasaran, atau mengevaluasi dan menerapkan kebijakan dan praktik. Pemangku kepentingan dan pengguna informasi yang lain dapat menggunakan Standar GRI untuk memahami apa yang diharapkan untuk

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilaporkan oleh organisasi dan juga untuk menilai bagaimana mereka terdampak atau bagaimana mereka dapat terdampak oleh kegiatan organisasi. Investor dapat menggunakan informasi pelaporan untuk menilai dampak organisasi serta integrasi keberlanjutan dalam bisnis dan strategi mereka. Ini membantu mengidentifikasi risiko dan peluang finansial, serta menilai keberhasilan jangka panjang. Selain itu, akademisi dan analis dapat memanfaatkan informasi ini untuk penelitian atau *benchmarking*.

e. Sistem Standar GRI

Standar GRI disusun sebagai sistem standar yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1) Standar Universal: GRI 1, GRI 2 dan GRI 3

Organisasi mengawali dengan mempelajari GRI 1: Landasan 2021. GRI 1 memperkenalkan tujuan dan sistem Standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan. GRI 1 juga menguraikan berbagai persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI. GRI 2: Pengungkapan Umum 2021 berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail organisasi lainnya, seperti kegiatan, tata kelola, dan kebijakan. Informasi ini memberikan wawasan mengenai profil dan skala organisasi serta memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi. GRI 3: Topik Material 2021 menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material. GRI 3 juga terdiri dari pengungkapan untuk melaporkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material, dan cara mengelola setiap topik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Standar Sektor

Standar Sektor menyajikan informasi untuk organisasi menentukan mana yang berpotensi menjadi topik material mereka. Organisasi menggunakan Standar Sektor yang berlaku untuk sektornya saat menentukan topik materialnya, dan saat menentukan informasi apa yang akan dilaporkan untuk topik material.

3) Standar Topik

Standar Topik berisi pengungkapan bagi organisasi untuk melaporkan informasi tentang dampaknya sehubungan dengan topik tertentu. Standar Topik mencakup berbagai macam topik. Penggunaan Standar Topik berhubungan dengan daftar topik material yang telah organisasi tentukan menggunakan GRI 3.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8 Corporate Social Responsibility Disclosure (Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan)

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) adalah kegiatan mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, yang mencakup perhatian terhadap isu-isu dampak sosial dan lingkungan (Rosyati et al., 2023). CSRD merupakan proses penyampaian informasi yang relevan mengenai dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi suatu organisasi kepada kelompok pemangku kepentingan yang terkait dan masyarakat secara luas. Hal ini mencakup laporan yang menyampaikan semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosialnya. Awal dari pelaporan non-keuangan dapat dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi mengenai tindakan perusahaan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan lingkungan (Nielsen dan Thomsen, 2007). Selain itu, diakui bahwa pengungkapan informasi non-keuangan sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



antara manajemen dan pemangku kepentingan utama, memungkinkan investor untuk menilai area-area kinerja utama dengan lebih baik, dan mendukung pandangan yang lebih luas tentang kinerja perusahaan yang mencakup masyarakat luas (Huang dan Watson, 2015).

Pengukuran CSRD menggunakan rumus *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI), yaitu jumlah pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah total item yang diharapkan untuk diungkapkan oleh perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2005). Dalam melakukan pengungkapan CSR oleh perusahaan di Indonesia, terdapat beberapa pedoman daftar pengungkapan, yaitu *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berlaku secara internasional serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang berlaku secara nasional. Pedoman GRI yang terbaru dan saat ini dipakai adalah *GRI Standards 2021* serta POJK dan SEOJK yang terbaru dan yang dipakai adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba atau profit dari operasinya (Agit et al., 2023). Laba tersebut didapatkan melalui penjualan, total aset, dan modal sendiri yang juga akan menarik bagi investor jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pengolahan sumber-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sumber saat ini yang dapat digunakan. Rasio profitabilitas adalah perhitungan profitabilitas perusahaan berdasarkan hasil laba selama periode waktu tertentu.

Menurut Siswanto (2021), profitabilitas dapat diukur menggunakan beberapa rumus, yaitu:

- a. *Return on Asset* (ROA), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang miliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.

$$ROA = \frac{EAT}{Total\ assets}$$

- b. *Return on Equity* (ROE), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri.

$$ROE = \frac{EAT}{Equity}$$

- c. *Net Profit Margin* (NPM), mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan.

$$NPM = \frac{EAT}{Sales}$$

- d. *Operating Profit Margin* (OPM), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dilakukan.

$$OPM = \frac{EBIT}{Sales}$$

- e. *Gross Profit Margin* (GPM), rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan yang dilakukan.

$$GPM = \frac{EBIT}{Sales}$$

- f. *Basic Earning Power* (BEP), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dengan menggunakan total aset yang dimiliki.

$$BEP = \frac{EBIT}{Total\ assets}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

10. Likuiditas

Pengertian likuiditas menurut Agit et al. (2023) adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang harus dilunasi. Likuiditas mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat mengubah aset menjadi uang tunai tanpa mengalami kerugian yang berarti untuk membayar utang-utang yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya sebagai akibat jatuh tempo (Suriyanti dan Hamzah, 2023). Analisis likuiditas merupakan bagian penting dalam menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya.

Menurut Siswanto (2021), untuk mengukur likuiditas dapat menggunakan rumus berikut:

- a. *Current Ratio* (CR), rasio ini mengukur ketersediaan aset lancar yang bisa digunakan untuk melunasi kewajiban lancar.

$$CR = \frac{Current\ asset}{Current\ liabilities}$$

- b. *Quick Ratio* (QR), rasio ini mengukur ketersediaan aset lancar (tidak termasuk persediaan) yang bisa digunakan untuk melunasi kewajiban lancar.

$$QR = \frac{Current\ asset - Inventory}{Current\ liabilities}$$

11. Leverage

Menurut Siswanto (2021) *leverage* merupakan biaya tetap yang muncul akibat struktur modal atau keuangan perusahaan. *Leverage* terjadi karena perusahaan menggunakan aset atau dana dalam operasinya yang menghasilkan



beban tetap. Singkatnya, *leverage* adalah jumlah utang yang digunakan untuk mendanai atau membeli aset perusahaan. Penggunaan utang dalam jumlah yang sangat besar akan menjadi masalah bagi perusahaan karena akan masuk ke dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrem), yaitu terjebaknya perusahaan dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk dilepaskan. Sehingga perusahaan harus memilih seberapa besar utang yang layak diambil dan sumber mana yang dapat digunakan untuk melunasi utang. Rasio *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur perusahaan (Suriyanti dan Hamzah, 2023). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar utangnya, yang mungkin menandakan bahwa perusahaan tidak lagi mampu menghasilkan penjualan atau laba untuk memenuhi komitmen utangnya.

Untuk menghitung *leverage*, terdapat beberapa rumus menurut Siswanto (2021) yang dapat digunakan. Rumus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Debt Ratio* (DAR), rasio ini mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan.

$$DAR = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

- b. *Debt to Equity Ratio* (DER), rasio ini mengukur perbandingan proporsi utang dan modal sendiri atau ekuitas.

$$DER = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$$

- c. *Long-term Debt to Equity Ratio* (LDER), rasio ini mengukur seberapa besar penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri.

$$LDER = \frac{LTD}{\text{Total equity}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. *Time Interest Earned Ratio* (TIE), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga dengan menggunakan laba operasi (EBIT).

$$TIE = \frac{EBIT}{Interest}$$

- e. *Cash Coverage Ratio* (CCR), rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar beban tetap dalam bentuk bunga dengan menggunakan EBIT ditambah dengan depresiasi.

$$CCR = \frac{EBIT + Depresiasi}{Interest}$$

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

12. Proporsi Dewan Komisaris

Menurut Musdalifah dan Himmati (2021), dewan komisaris adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan strategi perusahaan, meminta pertanggungjawaban keuangan, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Tugas pengawasan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dewan komisaris dinominasikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kompeten, bereputasi baik, terampil, dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai operasional perusahaan. Tugas mereka adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik BAB I Pasal 1 dijelaskan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Dalam BAB III Pasal 20 dijelaskan jika dewan komisaris beranggotakan dua orang, salah satunya harus komisaris independen.



Jika lebih dari dua orang, minimal 30% dari total anggota dewan komisaris wajib merupakan komisaris independen.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Proporsi dewan komisaris dihitung menggunakan rasio atau persentase yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Djuitaningsih dan Marsyah, 2012). Proporsi dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan adanya lebih banyak perspektif secara objektif dalam pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen, sehingga mendorong manajemen untuk mengungkapkan CSR lebih banyak demi menjaga citra perusahaan. Menurut Djuitaningsih dan Marsyah (2012) proporsi dewan komisaris dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$PDK = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris, Proporsi Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021)
	Peneliti	FY Afrizal
	Tahun Penelitian	2024
	Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Proporsi Dewan Komisaris, Proporsi Perusahaan, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>
1.	Hasil Penelitian	a) Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Proporsi Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> d) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Judul	Profitabilitas, likuiditas dan <i>leverage</i> terhadap <i>corporate social responsibility</i> (CSR) pada perusahaan terdaftar di BEI Tahun 2017-2020
1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Peneliti	H Sularsih
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	<i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>
	Hasil Penelitian	a) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> c) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks SRI KEHATI Tahun 2014-2018)
	Peneliti	S Firdausi, WA Prihandana
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>
2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian	a) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Proporsi Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Peneliti	AZ Sulaeman, H Mulyani, L Yuliyanti
	Tahun Penelitian	2022
	Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Proporsi Perusahaan
3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Hasil Penelitian	a) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) Proporsi Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Proporsi Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Peneliti	AZ Sulaeman, H Mulyani, L Yuliyanti
	Tahun Penelitian	2022
4. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Proporsi Perusahaan
	Hasil Penelitian	a) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) Proporsi Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Proporsi Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5.	No.	Judul	Pengaruh Proporsi Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)
		Peneliti	RN Afifah, I Immanuela
		Tahun Penelitian	2021
		Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
		Variabel Independen	Proporsi Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan <i>Leverage</i>
6.		Hasil Penelitian	a) Proporsi Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> d) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
		Judul	Pengaruh Proporsi Perusahaan, <i>Leverage</i> , Proporsi Dewan Komisaris dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang <i>Go Public</i> Tahun 2016-2018 di Bursa Efek Indonesia)
		Peneliti	A Sugeng
		Tahun Penelitian	2020
		Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
7.		Variabel Independen	Profitabilitas, Proporsi Perusahaan, dan <i>Leverage</i>
		Hasil Penelitian	a) Proporsi Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) Proporsi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> d) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
		Judul	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2017
		Peneliti	KA Putri, EM Aditya, N Nurdhiana
		Tahun Penelitian	2019
		Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
		Variabel Independen	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>
		Hasil Penelitian	a) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No.	Judul	Efek Moderasi Dewan Komisaris Antara Manajemen Laba Riil, Profitabilitas, Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
8.	Peneliti	M U Sofwan
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Manajemen Laba Riil, Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>
	Variabel Pemoderasi	Dewan Komisaris
	Hasil Penelitian	a) Manajemen laba riil berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> d) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> e) Dewan komisaris memperkuat pengaruh Manajemen laba riil terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> f) Dewan komisaris tidak memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> g) Dewan komisaris memperkuat pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> h) Dewan komisaris memperlemah pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Likuiditas Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014 – 2018
	Peneliti	E Arita, R Mukhtar
	Tahun Penelitian	2019
	Variabel Dependen	<i>Corporate Social Responsibility</i>
9.	Variabel Independen	Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Leverage</i>
	Hasil Penelitian	a) Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> c) <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Judul	Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Peneliti	PAC Dewi, IBP Sedana
	Tahun Penelitian	2019
10.	Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
	Variabel Independen	Profitabilitas, Proporsi Perusahaan, dan <i>Leverage</i>
	Hasil Penelitian	a) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> b) Proporsi Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> c) <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap CSRD

Pengungkapan indeks sosial dan lingkungan memiliki hubungan yang substansial dengan keberhasilan ekonomi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam program *Corporate Social Responsibility*. Semakin besar profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin besar dana yang dapat dialokasikan pada kegiatan CSR dan semakin besar pula kewajiban perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosialnya karena publik berhak mengetahuinya, dengan tujuan menghasilkan transparansi informasi yang akan berkontribusi pada citra baik perusahaan. Sehingga profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSRD, di mana semakin besar profitabilitas suatu perusahaan maka semakin banyak pengungkapan CSR yang dilakukan. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian dari Sugeng (2020), Arita dan Mukhtar (2019), Mahalistianingsih dan Yuliandhari (2021), yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD).

2. Pengaruh Likuiditas terhadap CSRD

Teori legitimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi pula. Hal ini karena perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk diinvestasikan dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Ketika perusahaan memiliki likuiditas yang baik, mereka dapat lebih leluasa untuk mengalokasikan dana untuk inisiatif *Corporate Social Responsibility* tanpa

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengorbankan kebutuhan operasional sehari-hari. Selain itu, pengungkapan informasi CSR yang lebih rinci dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan mampu mempertahankan kinerja keuangan yang baik, sehingga menciptakan citra positif di mata publik dan investor. Maka, likuiditas berpengaruh positif terhadap CSRD, perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi maka tingkat CSRD pun akan tinggi pula, sebaliknya jika rasio likuiditas rendah maka tingkat CSRD pun akan rendah. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian dari Sularsih dan As'adi (2022), Dipasti dan Sulistyowati (2022), dan Wasito et al. (2016) yang menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD).

3. Pengaruh *Leverage* terhadap CSRD

Semakin tinggi tingkat *leverage*, berarti semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit di masa mendatang (Santioso dan Chandra, 2012). Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung memprioritaskan pembayaran bunga dan pokok utang. Hal ini dapat membuat perusahaan mengalihkan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* menjadi pembayaran kewajiban finansial. Selain itu adanya tekanan untuk memenuhi kewajiban utang dapat membuat perusahaan lebih berfokus pada kinerja keuangan jangka pendek dan mengabaikan investasi jangka panjang dalam kegiatan CSR yang memberikan manfaat jangka panjang. Sehingga *leverage* berpengaruh negatif terhadap CSRD, di mana tingkat *leverage* yang tinggi akan membuat CSRD menjadi rendah karena perusahaan berfokus untuk membayar kewajiban finansial,

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebaliknya jika tingkat *leverage* rendah maka CSRD menjadi tinggi karena perusahaan tidak berfokus membayar kewajiban finansial dan dapat mengalokasikan sumber daya-nya terhadap kegiatan sosial. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Firdausi dan Prihandana (2022), Tiarani et al. (2023), dan Dewi dan Sedana (2019) bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD).

4. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris memoderasi Profitabilitas terhadap CSRD

Agar terhindar dari masalah yang berhubungan dengan teori agensi, dewan komisaris akan menggunakan tekanan kepada manajer untuk melakukan dan mengungkapkan informasi mengenai CSR. Ketika profitabilitas perusahaan meningkat, dewan komisaris yang efektif dapat mendorong manajemen untuk lebih transparan dalam melaporkan dan lebih luas lagi dalam mengungkapkan kegiatan CSR. Karena dewan komisaris berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada tanggung jawab sosialnya, dan dewan komisaris independen akan bertindak secara objektif dalam mendorong perusahaan melakukan CSRD. Dengan adanya dewan komisaris yang kuat, pengungkapan CSR menjadi lebih substansial, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan citra positif bagi perusahaan. Maka, proporsi dewan komisaris memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap CSRD.

5. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris memoderasi Likuiditas terhadap CSRD

Likuiditas merupakan salah satu kinerja yang sering dijadikan tolok ukur investor dalam menilai perusahaan. dapat meningkatkan pengawasan



dan akuntabilitas perusahaan. Ketika likuiditas perusahaan tinggi, artinya perusahaan memiliki kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, yang memberikan ruang bagi manajemen untuk berinvestasi dalam kegiatan CSR. Dewan komisaris yang efektif dapat mendorong manajemen untuk lebih aktif dalam melaporkan dan mengimplementasikan inisiatif CSR, memastikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada kinerja keuangan tetapi juga pada tanggung jawab sosialnya. Selain itu, kehadiran komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, terutama dalam pengungkapan kegiatan CSR dan memastikan bahwa kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat, dapat terlindungi. Dengan demikian, proporsi dewan komisaris dapat memperkuat dampak positif likuiditas terhadap CSRD, menciptakan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris memoderasi *Leverage* terhadap CSRD

Ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, risiko finansial yang lebih besar mungkin mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan CSR, sehingga pengungkapan CSR bisa jadi terbatas. Dengan adanya dewan komisaris maka dewan komisaris dapat mendorong manajemen untuk tetap berkomitmen pada tanggung jawab sosial meskipun dalam situasi keuangan yang ketat, memastikan bahwa perusahaan tetap transparan dan akuntabel terhadap pemangku kepentingan. Selain itu, CSR dapat dipandang sebagai investasi, dengan pengungkapan CSR yang luas maka akan menarik investor untuk menanamkan modalnya. Dengan demikian, dewan komisaris dapat membantu

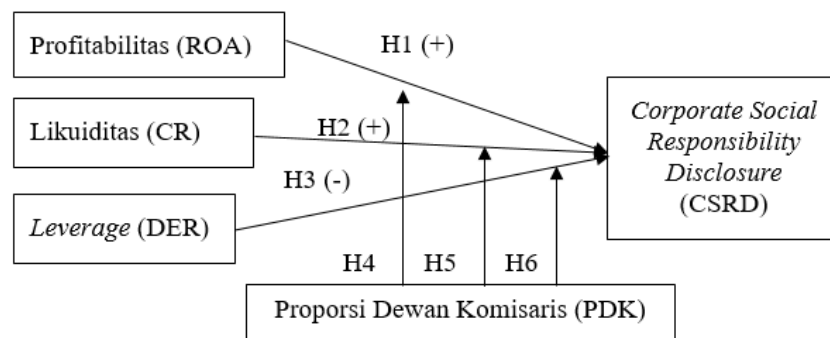
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyeimbangkan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban keuangan dengan tanggung jawab sosial, meningkatkan pengungkapan CSR meskipun perusahaan menghadapi tekanan dari utang, dan komisaris independen yang kuat dapat memastikan bahwa perusahaan tetap berkomitmen pada pengungkapan CSRD, meskipun memiliki tingkat utang yang tinggi. Sehingga proporsi dewan komisaris yang tinggi dapat memperlemah pengaruh *leverage* terhadap CSRD.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis

Penelitian ini menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSRD.

H₂: Likuiditas berpengaruh positif terhadap CSRD.

H₃: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap CSRD.

H₄: Proporsi dewan komisaris memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap CSRD.

H₅: Proporsi dewan komisaris memperkuat pengaruh likuiditas terhadap CSRD.

H₆: Proporsi dewan komisaris memperlemah pengaruh *leverage* terhadap CSRD.